

PERUSAHAAN PERSEROAN

2019

PERDA KAB.BARRU NO.13, LD 2019/No.13.KAB.BARRU HLM 39

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAMUDRA NUSANTARA BARRU

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan letak geografis Kabupaten Barru yang merupakan faktor strategis bagi sektor kepelabuhanan, sebagai sektor kegiatan ekonomi yang potensial dan memiliki daya tarik yang prospektif, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan perkembangan sektor kepelabuhanan yang lebih tertata baik dan terintegrasi dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Barru pada umumnya. dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, serta memperkuat kemampuan pembiayaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diupayakan penggalan potensi pendapatan daerah dari sektor kepelabuhanan di Kabupaten Barru.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 ; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 64 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Perda Prov. Sulsel No. 5 Tahun 2014; Perda Prov. Sulsel No. 10 Tahun 2008; Perda Kab. Barru No. 6 Tahun 2010; Perda Kab. Barru No. 4 Tahun 2012; Perda Kab. Barru No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Barru No. 4 Tahun 2016; Perda Kab. Barru No. 15 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Daerah ini meliputi: nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya; besarnya modal dasar; organ dan pegawai; satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya; perencanaan, operasional, dan pelaporan; anak perusahaan; penugasan pemerintah kepada Perusahaan Perseroan Daerah; evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi; penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; kepailitan dan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.

Catatan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2019